

Perempuan Nelayan

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Nelayan

Artikel

Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina

Perjuangan Rekognisi Identitas Hukum Perempuan Nelayan Ujung Pangkah, Gresik: Analisis Feminis terhadap Kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan

Naufaludin Ismail

Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina

Ma. Linnea Villarosa-Tanchuling

Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi Perempuan Nelayan: Studi Kasus di Kampung Akuarium dan Kamal Muara, Penjarangan

Endah Kusuma Wardhani

Peran Produksi, Reproduksi dan Sosial Kemasyarakatan Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke, Jakarta Utara

Yekti Wahyuni

Kapabilitas Manusia untuk Pembangunan yang Berkeadilan: Studi Kasus Perempuan Petambak Udang di Dipasena, Lampung

Gadis Arivia & Abby Gina

Wawancara

Dedi Adhuri: Marginalisasi Perempuan Nelayan adalah Produk Kultur dan Kebijakan yang Diskriminatif

Abby Gina

Kata Makna

Nur Iman Subono

Profil

Masnuah, Pejuang Hak-Hak Perempuan Nelayan

Andy Misbahul Pratiwi

Resensi Buku

Ketika Pembangunan Mengabaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak

Naufaludin Ismail

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy

DEWAN REDAKSI

Atnike Nova Sigiro, M.Sc. (Human Rights Diplomacy,
Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum
Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University
California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer,
Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam &
Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL
Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty
of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik
Perempuan, SOAS University of London)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender,
Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas
Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas
Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas
Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan,
University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern
University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies
University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha
Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender,
Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet
Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan
Masyarakat & Gender, Auckland University of
Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender,
Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama
University)

Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice
Program Director-Oxfam in Indonesia)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme,
Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University
California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender,
University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender,
Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender,
Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia &
Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu
Naufaludin Ismail

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Elisabet Dwi

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, November 2017



FORDFOUNDATION



Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Nelayan / *Fisherwomen* iii

Artikel / Articles

- Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias / *The Existence and Power of Fisherwomen in Morodemak and Purworejo Villages: Against Violence, Bureaucracy & Biased of Religious Interpretation* 295-309
Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina
- Perjuangan Rekognisi Identitas Hukum Perempuan Nelayan Ujung Pangkah, Gresik: Analisis Feminis terhadap Kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan / *Struggle of Legal Identity Recognition of Fisherwomen in Ujung Pangkah, Gresik: Feminist Analysis toward Regulation on Fishermen Card and Insurance*..... 311-321
Naufaludin Ismail
- Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina / *Women in Gendered Fisheries: Roles, Issues and Challenges in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines*..... 323-331
Ma. Linnea Villarosa-Tanchuling
- Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi Perempuan Nelayan: Studi Kasus di Kampung Akuarium dan Kamal Muara, Penjaringan / *Reclamation of Jakarta Bay, Impoverishment and Marginalization of Fisherwomen: Case Study at Akuarium and Kamal Muara Village, Penjaringan*..... 333-344
Endah Kusuma Wardhani
- Peran Produksi, Reproduksi dan Sosial Kemasyarakatan Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke, Jakarta Utara / *Productive, Reproductive and Community Roles of Women Who Process Green Shells in Muara Angke, North Jakarta*..... 345-357
Yekti Wahyuni
- Kapabilitas Manusia untuk Pembangunan yang Berkeadilan: Studi Kasus Perempuan Petambak Udang di Dipasena, Lampung / *Human Capabilities for Fair Development: Case Study of Women Prawn Farmers in Dipasena, Lampung*..... 359-368
Gadis Arivia & Abby Gina

Wawancara / Interview

Dedi Adhuri: Marginalisasi Perempuan Nelayan adalah Produk Kultur dan Kebijakan yang Diskriminatif / *Dedi Adhuri: Marginalization of Fisherwomen is Cultural Product and Discriminatory Policy*..... 369-374
Abby Gina

Kata Makna / Words and Meaning

Nur Iman Subono 375-376

Profil / Profile

Masnua, Pejuang Hak-Hak Perempuan Nelayan / *Masnua, Fisherwomen Rights Defender*..... 377-383
Andy Misbahul Pratiwi

Resensi Buku / Book Review

Ketika Pembangunan Mengabaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak / *When Development Disregards Women's and Children's Rights*..... 385-388
Naufaludin Ismail

Perempuan Nelayan

Fisherwomen

“Poros Maritim” dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program utama dalam pemerintahannya. Ia berjanji saat kampanye untuk menempatkan nelayan sebagai aktor utama. Namun setelah 2,5 tahun masa pemerintahannya, niat presiden belum terwujud dan hal ini membuat sebagian besar nelayan kecewa. Pada tanggal 6 April 2017, di hari nelayan, mereka berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Istana Merdeka Jakarta menagih janji Presiden Joko Widodo (CNN Indonesia 2017). Masalah perikanan memang masalah penting sebab sedikitnya 200 juta orang bekerja sebagai nelayan tradisional terutama di negara-negara dunia berkembang. Peran mereka sangat besar sebab 70 persen kontribusi produksi perikanan dunia berasal dari mereka. Di tahun 2010 diperkirakan manusia mengonsumsi 128 juta ton ikan dan di dalam satu dekade terakhir ikan dikonsumsi 4,3 miliar orang. Di tahun 2021 diperkirakan 172 juta orang akan mengonsumsi ikan dan industri ini akan menjadi industri yang paling cepat berkembang (FAO 2012).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebenarnya sangat positif karena dimaksudkan untuk melindungi nelayan kecil. Namun implementasi kebijakan tersebut justru menyengsarakan nelayan kecil terutama perempuan nelayan. Sayangnya diskursus tentang perempuan nelayan masih sangat minim dan tidak diperhitungkan sebab definisi nelayan cenderung diartikan sebagai yang menangkap ikan sedangkan perempuan berperan sebagian besar sebagai pembersih ikan untuk dikonsumsi di rumah atau menjualnya di pasar-pasar. Mereka kadang tidak menerima upah di dalam bisnis rumah tangga. Bila pun mereka menangkap ikan di laut mereka dianggap hanya menemani suami. Definisi nelayan inilah yang membuat perempuan tidak diperhitungkan di sektor perikanan. Kontribusi perempuan nelayan dianggap tidak ada dan ini berdampak buruk terhadap perempuan nelayan karena tidak bisa mendapatkan akses kredit, teknologi pengolahan, fasilitas gudang pendinginan dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Kabar Bahari edisi 18 November-Desember 2015).

Panduan Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil (*Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries*) dalam konteks keamanan pangan dan penghapusan kemiskinan menyebutkan secara tegas kewajiban negara untuk memperlakukan perempuan nelayan termasuk pembudidaya dan petambak garam secara istimewa dan hak-haknya dijamin. Jaminan tersebut antara lain mendapatkan perumahan yang layak, sanitasi dasar yang aman dan higienis,

tabungan investasi dan kredit, bebas dari pelecehan seksual dan kekerasan, pengembangan teknologi, dan sebagainya, dengan merujuk kepada CEDAW. Bila perempuan nelayan tidak dijamin hak-haknya dan tidak didukung keberadaannya maka dapat diperkirakan bahwa kelompok miskin terbesar tentu datang dari golongan ini. Itu sebabnya, pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada perempuan nelayan dan mengubah definisi nelayan yang sangat maskulin. Bila hal ini tidak dilakukan maka pencapaian SDGs dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan gagal terutama komponen esensial seperti pemberantasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesinambungan pembangunan dari perikanan dan sumber daya laut.

Oleh sebab itu, analisis gender dalam soal perikanan dan sumber daya laut menjadi penting agar produktivitas dan keadilan terhadap perempuan terjamin. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan advokasi mengenai kesetaraan gender, membentuk “*champions*” (yang dapat memajukan hak-hak perempuan nelayan), kerja sama dengan peneliti dan para ahli kebijakan. Koalisi besar ini dibutuhkan antara LSM, pemerintah, peneliti dan akademisi. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa lensa gender dibutuhkan dalam memformulasi kebijakan perikanan yang menitikberatkan pada hak-hak perempuan. Selama ini perspektif gender dalam isu perikanan sangat lemah karena hanya fokus pada produksi ikan yang dikuasai oleh laki-laki. Selain itu, peranan perempuan nelayan harus masuk ke dalam semua instrumen internasional maupun nasional (Alami & Raharjo 2017).

Menyadari pentingnya peran dan kontribusi perempuan nelayan bagi perekonomian keluarga dan masyarakat, Jurnal Perempuan mengadakan riset di tiga wilayah yakni Dipasena, Demak dan Gresik untuk mengungkap tantangan, strategi dan upaya yang dilakukan perempuan nelayan guna mendapat pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan. Langkah kami mendokumentasikan pengalaman dan suara perempuan nelayan dapat terwujud berkat kerja sama dengan Kiara, PPNI, P3UW dan Puspita Bahari. Hasil riset selain kami dokumentasikan dalam JP edisi ini juga kami narasikan dalam bentuk film dokumenter. Edisi ini diharapkan dapat mendorong adanya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan nelayan dengan membuka akses bagi perempuan nelayan untuk mendapatkan kartu nelayan. Begitu juga dengan keberadaan film dokumenter, diharapkan dapat bermanfaat bagi proses advokasi perempuan nelayan di Indonesia.

(Anita Dhewy)

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina
(Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias

The Existence and Power of Fisherwomen in Morodemak and Purworejo Villages: Against Violence, Bureaucracy & Biased of Religious Interpretation

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 295-309, 3 tabel, 10 daftar pustaka

This research was conducted in Morodemak and Purworejo Village, Demak District, Central Java Province, Indonesia, by focusing on the problem faced by fisherwomen—who go to sea as well as who process the catches—and the activism of Puspita Bahari (fisherwomen organization in Demak). This research seeks to show that women have contributed to the economic progress of coastal communities. This research became a personal research because the researchers have the opportunity to observe the activity of fisherwomen who go to sea and also in the research process, the researchers participated in the advocacy process to get recognition as fisherwomen. By using Naila Kabeer gender analysis, this research found that the complexity of the problems faced by fisherwomen are layers ranging from family, community, market until state levels. The issues of the division of labor, the biased bureaucracy and domestic violence are the three main topics that studied in this paper. Recognition of the identity of fisherwomen becomes an urgency and first step that should be realized in order to improve fisherwomen condition.

Keywords: existence of fisherwomen, fisherwomen, morodemak, purworejo, tambak polo, domestic violence.

Penelitian ini dilakukan di Desa Morodemak dan Desa Purworejo dengan memfokuskan pada persoalan yang dihadapi oleh perempuan nelayan—yang melaut maupun yang mengolah hasil tangkapan—dan aktivisme Puspita Bahari. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi pada kemajuan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini menjadi penelitian yang personal karena penulis berkesempatan melakukan observasi langsung terhadap aktivitas perempuan nelayan yang melaut dan juga karena dalam perjalanannya peneliti ikut dalam perjuangan perempuan nelayan untuk mendapatkan pengakuan sebagai nelayan. Dengan menggunakan analisis gender Naila Kabeer penelitian ini menemukan bahwa kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan nelayan berlapis-lapis mulai dari level keluarga, masyarakat, komunitas dan pasar. Persoalan pembagian kerja, birokrasi yang bias serta kekerasan dalam rumah tangga adalah tiga topik utama yang dikaji dalam tulisan ini. Pengakuan terhadap identitas perempuan nelayan menjadi urgensi dan langkah awal yang harus diwujudkan guna memperbaiki kondisi perempuan nelayan.

Kata kunci: eksistensi perempuan nelayan, perempuan melaut, morodemak, purworejo, tambak polo, KDRT perempuan nelayan.

Naufaludin Ismail (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Perjuangan Rekognisi Identitas Hukum Perempuan Nelayan Ujung Pangkah, Gresik: Analisis Feminis terhadap Kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan

Struggle of Legal Identity Recognition of Fisherwomen in Ujung Pangkah, Gresik: Feminist Analysis toward Regulation on Fishermen Card and Insurance

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 311-321, 2 tabel, 10 daftar pustaka

This paper will focus on feminist analysis of Law No. 7 of 2016 on the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators and Salt Farmers and Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 16 of 2016 as the legal basis for policy on Fishermen Card and Insurance. This paper will also analyze the experiences of two fisherwomen in Ujung Pangkah, Gresik, East Java who successfully obtained legal identity in the form of fisher card and insurance as a form of legitimacy and recognition of their identity as fisherwomen. The strong patriarchal culture in various society layers, caused the recognition of the political identity of fisherwomen has become difficult, so a feminist analysis toward policy on fisher card and insurance is needed so that women can engage as active subjects in the policy.

Keywords: fisherwomen, patriarchy, sexism, legal identity, feminist policy

Tulisan ini akan berfokus pada analisis feminis pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2016 sebagai landasan hukum untuk kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan. Tulisan ini juga akan menganalisis pengalaman dua perempuan nelayan di Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur yang berhasil mendapatkan akses identitas hukum berupa kartu dan asuransi nelayan sebagai bentuk legitimasi dan rekognisi identitas politik mereka sebagai perempuan nelayan. Kuatnya budaya patriarki di berbagai lapisan sosial-masyarakat menyebabkan pengakuan atas identitas hukum perempuan nelayan menjadi sulit untuk direkognisi, sehingga diperlukan sebuah analisis feminis atas kebijakan kartu dan asuransi nelayan agar perempuan bisa terlibat sebagai subjek aktif di dalam kebijakan tersebut.

Kata Kunci: perempuan nelayan, patriarki, seksisme, identitas hukum, kebijakan feminis

Ma. Linnea Villarosa-Tanchuling (College of Social Work and Community Development University of the Philippines – Diliman, Metro Manila, Filipina)

Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina

Women in Gendered Fisheries: Roles, Issues and Challenges in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 323-331, 1 tabel, 7 daftar pustaka

This paper is a synthesis of the results of the case studies on women's situation in fisheries done by the members of the SEA Fish for Justice Network. The network is composed of 15 non-government and fishers organizations from the Southeast Asia region. It envisions equity in access to and control over off-shore, coastal and inland aquatic natural resources including the termination of suffering caused by unsustainable resources and/or privatized control over communal resources. The case

studies were conducted by SEAFish Network members in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines in the second and third quarter of 2008 to highlight the roles, issues and challenges faced by women in coastal communities as well as the spaces provided them to facilitate their empowerment. The network members who conducted the studies were FACT (Cambodia), KIARA (Indonesia), MCD (Vietnam) and PROCESS-Bohol, CERD, and Tambuyog Development Center (CERD).

Keywords: women roles, women's participation, division of labor

Artikel ini merupakan sintesis dari hasil studi kasus pada perempuan dalam industri perikanan yang dilakukan oleh anggota SEA FISH for Justice Network. Jaringan ini terdiri dari 15 organisasi nonpemerintah dan nelayan dari kawasan Asia Tenggara. Jaringan ini mengupayakan keadilan dalam akses dan kontrol atas sumber daya alam lepas pantai, pesisir dan darat, termasuk penghentian krisis yang disebabkan oleh sumber daya yang tidak berkelanjutan dan/atau privatisasi atas kontrol sumber daya yang bersifat publik. Penelitian dilakukan oleh anggota SEAFish Network di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2008 untuk menyoroti peran, isu dan tantangan yang dihadapi perempuan di masyarakat pesisir, serta ketersediaan ruang untuk mempermudah usaha pemberdayaan perempuan. Anggota jaringan yang melakukan penelitian adalah FACT (Cambodia), KIARA (Indonesia), MCD (Vietnam) dan PROCESS-Bohol, CERD, dan Tambuyog Development Center (CERD).

Kata kunci: peran perempuan, partisipasi perempuan, pembagian kerja

Endah Kusuma Wardhani (Program Studi Kajian Gender
Universitas Indonesia, Indonesia)

**Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi
Perempuan Nelayan: Studi Kasus di Kampung Akuarium
dan Kamal Muara, Penjaringan**

***Reclamation of Jakarta Bay, Impoverishment and
Marginalization of Fisherwomen: Case Study at Akuarium
and Kamal Muara Village, Penjaringan***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 333-344, 13 daftar
pustaka

It has been more than ten years since The Jakarta Bay reclamation project displaced fishermen from the sea where they were normally fishing. The direct impact of reclamation on fisherwomen was income decrease, because it has damaged the marine ecosystems due to the effects of sucking and backfilling of the sea sand. In addition, there will be at least 16,998 of fishermen households will be evicted from the coastal areas of Jakarta, Banten and Bekasi due to this reclamation. The findings of this study are: the reclamation made the fisherwomen become poorer, their burden is higher and they have experienced double marginalization. The research methodology is a qualitative study with feminist perspective. Data collection are by in-depth interview with ten fisherwomen, document study, and fields observation. Selection of research sites is purposive, namely Kampung Akuarium dan Kampung Kamal Muara, District of Penjaringan, North Jakarta Municipality. In particular, this study wants to bring up the voices of poor fisherwomen as marginalized group of people, who have not been heard. It is hoped they will be brave and voiced their rights and aspirations openly which they have not dared to do so.

Keywords: fisherwomen, Jakarta Bay reclamation, marginalization, fisherwomen impoverishment

Proyek reklamasi Teluk Jakarta setidaknya telah lebih dari sepuluh tahun menggeser para nelayan dari wilayah perairan yang merupakan sumber penghidupan mereka. Dampak reklamasi secara langsung pada perempuan nelayan adalah penurunan pendapatan karena ekosistem laut sedemikian rupa hancur akibat penghisapan dan pengurukan pasir laut. Selain itu, setidaknya terdapat 16.998 rumah

tangga nelayan akan tergeser dari wilayah pesisir Jakarta, Banten dan Bekasi akibat proyek reklamasi ini. Temuan dari penelitian ini adalah terjadinya penurunan pendapatan, beban kerja perempuan nelayan yang makin besar, dan makin termarginalisasinya para perempuan nelayan. Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif berperspektif feminis. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada sepuluh perempuan nelayan, studi dokumen, dan observasi di lapangan. Pemilihan lokasi penelitian bersifat purposif, yaitu di Kampung Akuarium, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara. Secara khusus, penelitian ini ingin memunculkan suara-suara perempuan nelayan miskin sebagai kaum marginal perkotaan, yang selama ini tidak terdengar. Diharapkan mereka kemudian berani bersikap dan menyuarakan hak dan aspirasi secara terbuka yang selama ini belum berani mereka lakukan.

Kata kunci: perempuan nelayan, reklamasi Teluk Jakarta, marginalisasi perempuan nelayan, pemiskinan perempuan nelayan

Yekti Wahyuni (Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian
Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Indonesia)

**Peran Produksi, Reproduksi dan Sosial Kemasyarakatan
Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke,
Jakarta Utara**

***Productive, Reproductive and Community Roles of Women
Who Process Green Shells in Muara Angke, North Jakarta***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 345-357, 2
gambar, 1 tabel, 13 daftar pustaka

This study aims to find out the productive, reproductive and community roles of fisherwomen in Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, North Jakarta. The subjects of the study were two fisherwomen who work in the processing of green shells, as owners and as shell-peeler laborer. The study explores women's experience as breadwinners in the marine sector including the experience as a catch fisherwomen. The results showed that the role of fisherwomen in the productive and improvement of the family economy is very real, either directly or indirectly as a fisherwomen or processor of marine products. Three roles of fisherwomen in Muara Angke, sub-district Penjaringan, North Jakarta namely productive, reproductive, and social community. The fisherwomen took part in supplementing family income. In addition to performing reproductive roles related to domestic work, fisherwomen also have an active social role in social movements in order to maintain their living spaces and their spheres. The study found the tendency of women to abandon the role of capture fisherwomen when carrying out the role of biological reproduction.

Keywords: fisherwomen, economic roles, social roles, production roles, reproductive roles, social community roles

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran produksi, reproduksi dan sosial kemasyarakatan perempuan nelayan di Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Subjek penelitian adalah dua orang perempuan nelayan yang bekerja di bidang pengolahan kerang hijau, sebagai pemilik dan sebagai buruh pengupas kerang. Penelitian menggali pengalaman perempuan sebagai pencari nafkah di sektor kelautan termasuk pengalaman sebagai nelayan tangkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan nelayan dalam produksi dan peningkatan ekonomi keluarga sangatlah nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai nelayan maupun pengolah hasil laut. Tiga peran perempuan nelayan di Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yakni produksi, reproduksi, dan sosial kemasyarakatan. Perempuan nelayan ikut ambil bagian dalam menambah pendapatan keluarga. Selain menjalankan peran reproduksi yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga, perempuan nelayan juga memiliki peran sosial kemasyarakatan dengan aktif dalam gerakan sosial dalam upaya mempertahankan ruang hidup dan ruang kelolaan. Penelitian menemukan kecenderungan perempuan meninggalkan

peran sebagai nelayan tangkap ketika menjalankan peran reproduksi biologis.

Kata kunci: perempuan nelayan, peran ekonomi, peran sosial, peran produksi, peran reproduksi, peran sosial kemasyarakatan

Gadis Arivia & Abby Gina (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Kapabilitas Manusia untuk Pembangunan yang Berkeadilan: Studi Kasus Perempuan Petambak Udang di Dipasena, Lampung

Human Capabilities for Fair Development: Case Study of Women Prawn Farmers in Dipasena, Lampung

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 359-368, 4 tabel, 5 daftar pustaka

This study examines the role of women prawn farmers in Dipasena, East Rawajitu District, Tulang Bawang, Lampung and what it means for human development in Indonesia. Several focus group discussions and indepth interviews with women prawn farmers and fishermen community were conducted to collect data and understand comprehensively the issues that women prawn farmers face in a patriarchal culture where they are not acknowledged as women workers. This paper uses a feminist perspective on women and work and Martha Nussbaum's capability

categories. This paper concludes that women's roles and contribution in fishery and in national development is not recognized and not accommodated in national and local policies. Women's role in fishery industry is considered non-existent in this society and therefore restrict their potential and meaningful existence and respect on equal human dignity.

Keywords: women prawn farmers, capabilities, human dignity, development, Martha Nussbaum

Penelitian ini melihat peran perempuan petambak udang di Dipasena, Kabupaten Rawajitu Timur, Tulang Bawang, Lampung dan melihat apa dampaknya pada pembangunan manusia di Indonesia. Beberapa diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam dengan para petambak perempuan dan komunitas nelayan dilakukan untuk pengumpulan data guna memahami secara komprehensif persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan petambak di dalam masyarakat patriarki, di mana mereka tidak diakui sebagai petambak perempuan. Tulisan ini menggunakan perspektif feminis tentang perempuan dan kerja dan pendekatan kapabilitas dari Martha Nussbaum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa peran dan kontribusi perempuan dalam perikanan dan pembangunan nasional tidak diakui dan tidak diakomodasi dalam kebijakan nasional dan daerah. Peran perempuan dalam industri perikanan tidak diakui dalam masyarakat sehingga membatasi eksistensi mereka yang potensial dan bermakna serta membatasi penghargaan atas kesetaraan manusia.

Kata Kunci: perempuan petambak udang, kapabilitas, kemartabatan manusia, pembangunan, Martha Nussbaum

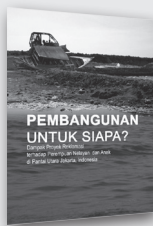
Ketika Pembangunan Mengabaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak

When Development Disregards Women's and Children's Rights

Naufaludin Ismail

Jurnal Perempuan

naufal@jurnalperempuan.com



Judul	:	Pembangunan untuk Siapa? Dampak Proyek Reklamasi terhadap Perempuan Nelayan dan Anak di Pantai Utara Jakarta, Indonesia
Penulis	:	Midaria Novawanty Saragih dan Dedy Ramanta
Jumlah Halaman	:	83 Halaman
Penerbit	:	Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Tahun Terbit	:	2009

Sejarah Singkat Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Buku ini terbit pada tahun 2009 dan merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) pada bulan Agustus hingga September 2008 untuk melihat dampak reklamasi Teluk Jakarta, terutama pada perempuan dan anak. Sekalipun buku ini terbit delapan tahun yang lalu ketika isu reklamasi Jakarta belum menjadi perhatian publik, buku ini telah menyajikan persoalan perempuan dan anak di pesisir Jakarta yang disertai dengan data empiris mengenai dampak negatif dari reklamasi Teluk Jakarta. Ketika membicarakan tentang reklamasi, isu perempuan dan anak seringkali terlewatkan oleh kita karena mungkin dianggap bukan isu utama yang menarik untuk diketahui oleh publik. Sementara sesungguhnya perempuan dan anak adalah kelompok minoritas yang juga mengalami dampak negatif yang cukup masif dan struktural dari reklamasi tersebut. Buku ini mencoba menyajikan persoalan atau isu perempuan dan anak yang seringkali diabaikan oleh banyak pihak ketika membicarakan dampak negatif dari reklamasi. Sejarah reklamasi Pantai Utara (Pantura) dikembangkan dengan menimbun laut pada kedalaman delapan meter. Wilayah yang akan direklamasi dimulai dari sisi barat yang bersebelahan dengan Kabupaten Tangerang sampai Bekasi di bagian timur. Desain reklamasi tersebut banyak menuai protes keras dari kalangan akademisi dan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM). Bahkan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Jakarta dibatalkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup hingga akhirnya para pengembang membuat rancangan baru reklamasi Pantura yang dilakukan dengan membentuk pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta yang terpisah dengan daratan melalui sistem lateral kanal. Kegiatan ini terlihat secara implisit sejak PT Kapuk Naga Indah menggusur komunitas nelayan di wilayah Kamal Muara. Sementara itu, reklamasi di Pantai Marina Ancol dimaksudkan untuk memperluas wilayah perumahan di bawah PT Agung Sedayu Group. Demikian juga halnya di Marunda, berlangsung proyek reklamasi yang dilakukan oleh PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan Marunda Center (Saragih & Ramanta 2009, h. 2).

Wilayah yang menjadi fokus penelitian di buku ini adalah Kampung Marunda Kepu Kecamatan Cilincing. Secara geografis, Kampung Marunda Kepu berada di ujung timur Kota Jakarta. Letaknya bersebelahan dengan Bekasi. Walau daerah ini terhantam arus pembangunan yang besar, masih terdapat beberapa peninggalan tua seperti Masjid Marunda Alam yang dibangun sekitar 1527 Masehi dan Rumah Pitung yang kini dilindungi oleh pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai Cagar Budaya II Tahun 1972. Berdasarkan data pada tahun 2008, jumlah penduduk Kampung Marunda Kepu Kecamatan Cilincing di RT 08/RW 07 yang menjadi lokasi penelitian adalah sebanyak 174 jiwa, dengan 89 orang perempuan dan 85

orang laki-laki. Sementara di RT 09/RW 07 terdapat 105 jiwa penduduk, terdiri dari 65 orang perempuan dan 40 orang laki-laki. Sebanyak 60 persen penduduk Kampung Marunda Kepu Kecamatan Cilincing hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar bahkan 15 persennya sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Fakta lain dari Kampung Marunda Kepu Kecamatan Cilincing adalah 55 orang di antara mereka berprofesi sebagai nelayan (Saragih & Ramanta 2009, h. 23-25). Hal ini sangat menyedihkan, mengingat mereka tinggal di wilayah ibukota negara yang merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi. Faktor pendidikan yang rendah ini sudah pasti membuat perekonomian warga di Kampung Marunda Kepu Kecamatan Cilincing tidak sebaik warga Jakarta lainnya, terlebih kini wilayah mereka untuk mencari penghidupan sudah tergusur oleh proyek reklamasi.

Wacana proyek reklamasi Teluk Jakarta sudah dimulai sejak tahun 1990-an. Wacana tersebut selanjutnya menjadi program yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) VI tentang Pantura sebagai kawasan andalan. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 mempertegas bahwa reklamasi akan dilaksanakan di Pantai Utara Jawa. Untuk mendukung Keputusan Presiden tersebut, maka lahirlah Peraturan Daerah DKI Nomor 8 tahun 1995 (Saragih & Ramanta 2009, h. 31). Tanah di kawasan Marunda tidak dapat lagi digunakan untuk menanam tumbuhan, air asin semakin mudah meresap ke dalam tanah karena hutan bakau di Teluk Jakarta sudah rusak pascareklamasi terjadi di wilayah ini. Reklamasi di Teluk Jakarta telah menghancurkan hutan bakau, pencemaran air dan sampah menumpuk. Bahkan, saat ini Marunda jauh dari ketersediaan air bersih. Temuan dari Tim Ekspedisi Pesisir Teluk Jakarta 2007 menyebutkan bahwa Perairan Teluk Jakarta selalu menerima limbah organik hasil aktivitas belasan juta manusia di kawasan Jabotabek. Konsentrasi amoniak lebih buruk dari standar, bahkan sampai 10 kalinya. Konsentrasi nitrat tercatat 5 kali lebih buruk dari standar tahun 2002. Konsentrasi nitrat dan fosfat lebih jelek dari standar tahun 2001, tetapi lebih baik pada tahun 2002. Konsentrasi fenol, timah, dan tembaga lebih baik dari standar pada tahun 2001 dan 2002. Dari Ciliwung, Cipinang, Mookervart, dan sungai-sungai lain juga terdapat beban BOD, COD, TSS, dan nutrisi (nitrat, nitrit, fosfat) yang memasuki perairan Teluk Jakarta (Saragih & Ramanta 2009, h. 43). Kawasan pesisir Teluk Jakarta terutama Kampung Marunda Kepu sudah tercemar berat, sehingga mengakibatkan ribuan nelayan menurun pendapatannya, buruknya

kualitas air bersih, kematian massal ikan dan biota air lainnya serta menyebabkan Kampung Marunda Kepu mengalami kerusakan ekologi yang cukup parah dan sangat merugikan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Tak terkecuali perempuan dan anak yang juga mengalami dampak kerusakan dari proyek reklamasi di Teluk Jakarta ini.

Kesengsaraan dan Penderitaan Perempuan dan Anak Akibat Proyek Reklamasi

Keterlibatan perempuan dalam sektor perikanan dan laut di Kampung Marunda Kepu pada umumnya berlangsung pada proses pascaproduksi seperti penjualan ikan, pengeringan ikan, dan pengupasan kerang. Para perempuan Marunda bekerja bersama mencari nafkah, seperti mengupas kerang dan menjual hasil tangkapan ikan para suami ke pasar. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga para anak perempuan Marunda yang berumur sekitar 5-17 tahun rata-rata menghabiskan waktunya untuk mengerjakan pekerjaan domestik, seperti mencuci pakaian, memasak untuk keluarga, menjaga adik-adik, dan bahkan sebagian dari mereka ikut mengupas kerang. Tak jarang anak perempuan pada usia 15-17 tahun di Kampung Marunda sudah menikah atau dinikahkan. Kegiatan mengupas kerang adalah kegiatan rutin di kampung tersebut yang berjalan setiap hari sekalipun tangkapan kerang tidak banyak karena limbah yang mencemari lingkungan hidup kerang. Komunitas pengupas kerang terdiri dari 25 s.d. 30 orang, di antaranya perempuan berusia 7 s.d. 80 tahun. Selain komunitas perempuan pengupas kerang, ada juga perempuan yang berdagang ke pasar. Namun jumlah mereka tidaklah banyak. Di Kampung Marunda RT 08 terdapat 5 orang pedagang perempuan dan 2 pedagang perempuan di RT 09/RW 07. Saat ini mata pencaharian utama perempuan di Marunda untuk memperoleh uang ada beberapa jenis, yaitu mencari kerang dan menjualnya ke pasar, memproses ikan kering sisa tangkapan suami dan menjualnya, dan membuat kerajinan tangan dari cilong. Pada umumnya mereka membantu suami untuk membuat dan memperbaiki jaring (Saragih & Ramanta 2009, h. 55-57). Kenaikan BBM pada Mei 2008 membuat para ibu berutang ke banyak pihak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan paling sering mereka berutang pada rentenir/bank keliling.

Pendapatan keluarga yang terus berkurang dengan angka kenaikan harga kebutuhan hidup rata-rata mencapai seratus persen, misalnya gas untuk ukuran 3 kilogram naik dari Rp17.000,00 menjadi Rp25.000,00;

minyak goreng mencapai Rp13.000,00 per kilogram dan beras dengan kualitas terendah senilai Rp 4.500,00 per liter membuat mereka harus kembali pada kehidupan yang serba sulit dan terbatas. Suami mereka sebagai nelayan tak lagi leluasa berlayar karena kekurangan modal untuk bahan bakar, yang dapat dilakukan hanya menunggu hasil tangkapan dari jaring yang sudah dipatok di pinggir pantai. Para ibu menggunakan kayu bakar untuk memasak ikan tanpa minyak goreng. Demikian pula halnya anak-anak harus berjalan kaki sejauh 2 km untuk bisa sampai ke SD Marunda 02. Hal ini akhirnya menyebabkan para perempuan di Kampung Marunda menjadi pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang semakin mencekik pasca reklamasi di wilayah mereka. Pendapatan warga Kampung Marunda berkisar antara Rp10.000,00 - Rp20.000,00 per hari. Salah satu kisah perempuan di wilayah Kampung Marunda Kepu yang diangkat di dalam buku ini adalah kisah hidup Habibah. Suami Habibah dahulunya berprofesi sebagai nelayan, kemudian beralih profesi sebagai 'pelele' atau tengkulak hasil tangkapan nelayan lainnya, namun karena suaminya tidak bisa baca tulis, kemudian pekerjaan pelele ini dipimpin oleh Habibah. Sebagai seorang "pelele" Bu Habibah membutuhkan uang tunai tiap harinya. Habibah mengumpulkan rebon untuk kemudian dijual, setelah rebon disetor baru dia mendapat keuntungan. Padahal tiap hari harus ada uang tunai untuk membayar hasil tangkapan nelayan serta mencukupi kebutuhan keluarga (gula, kopi, beras, uang saku anak-anak). Solusinya, ia meminjam bank keliling/rentenir dengan bunga sebesar 2%, dengan tempo pembayaran selama sebulan. Rata-rata kaum ibu Marunda Kepu meminjam bank keliling sebesar Rp100.000,00 dengan cicilan Rp4.000,00 per hari selama 30 hari. Namun dari pinjaman Rp100.000,00 yang diterima hanya Rp 90.000,00 karena ada potongan Rp5.000,00 untuk tabungan dan Rp5.000,00 untuk biaya administrasi. Hampir semua kaum ibu di Marunda Kepu pernah berurusan dengan bank keliling tersebut. Praktik rentenir semacam itu telah bertahun-tahun terjadi di kalangan nelayan dan hampir semua debitur ternyata membayar lunas semua pinjamannya. "Ya gimana gak lunas mas, gak enak kalau gak bayar, lagian kita butuh juga besok-besoknya," ujar Habibah. Untuk pinjaman dengan jumlah besar maka warga meminjam ke Dewan Kelurahan dengan bunga 20%-30% dan cicilan minimal 100 ribu rupiah tiap bulan. Namun menurut warga pinjam bank keliling dirasakan lebih mudah karena tidak terlalu mengandalkan garansi dan jaminan lain-lain (Saragih & Ramanta 2009, h. 64-66).

Persoalan lain yang harus dihadapi perempuan dan anak di wilayah Kampung Marunda Kepu adalah

persoalan pendidikan dan kesehatan. Anak Habibah sendiri rata-rata hanya lulusan SD, bahkan anak kecilnya hanya bersekolah sampai dengan kelas 5 SD saja. Hal serupa hampir dialami seluruh keluarga di wilayah Kampung Marunda Kepu. Baik anak perempuan maupun laki-laki di Kampung Marunda menganggap pendidikan bukanlah hal yang penting karena yang mereka pahami untuk dilakukan adalah membantu orang tua mencari nafkah atau tidak lagi membebani orang tua dengan cara menikah di usia dini. Umur pernikahan rata-rata untuk perempuan Kampung Marunda Kepu adalah 15 s.d. 17 tahun, sementara para lelaki rata-rata 17-18 tahun (Saragih & Ramanta 2009, h. 67). Untuk persoalan kesehatan, perempuan dan anak di wilayah Marunda Kepu juga mengalami kesulitan yang amat besar. Kondisi sanitasi dan lingkungan Marunda Kepu sangat memprihatinkan karena tidak tersedianya air bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mandi, mencuci, memasak, dan buang air besar/kecil. Warga menggunakan Kali Banjir Kanal Timur (BKT) untuk keperluan ekskresi mereka. Kampung Marunda Kepu sempat mendapat bantuan bangunan untuk MCK (Mandi Cuci Kakus) dari *World Vision*, akan tetapi MCK tersebut tidak terpakai karena tidak ada air bersih gratis. Beberapa rumah juga membangun toilet umum, namun hanya digunakan waktu musim hujan. Jika ada perempuan sakit, biasanya mereka pergi ke klinik dengan biaya Rp45.000,00 sekali periksa, ini belum termasuk biaya obat. Kalau mereka berobat di puskesmas biayanya hanya Rp3.000,00, namun beberapa ibu mengeluh karena sedikitnya obat yang diperoleh dari puskesmas atau terkadang harus mengambil obat di apotek, yang berarti harus mengeluarkan biaya tambahan. Semenjak pembangunan Marunda Center, KBN Marunda, Tanggul Banjir Kanal Timur, masyarakat Marunda sering mengalami batuk dan sesak napas atau dunia kedokteran biasa menyebutnya ISPA (Inspeksi Saluran Pernafasan Akut). Sedikitnya 4 orang bayi telah meninggal karena demam semenjak April 2008. Warga meyakini hal tersebut karena debu dan air got yang tidak mengalir (Saragih & Ramanta 2009, h. 68). Budaya patriarki juga menjerat perempuan di wilayah ini sehingga menyebabkan para perempuan di Kampung Marunda tidak pernah sekalipun dilibatkan dalam pengambilan keputusan penggusuran tanah untuk proyek reklamasi. Perempuan di Kampung Marunda Kepu hanya menjalani kehidupan sebagai individu yang ter subordinasi dengan segala polemik yang mau tidak mau mereka rasakan setelah proyek reklamasi berlangsung, para perempuan di Marunda Kepu tetap berjuang untuk hidup demi kelangsungan keluarga mereka.

Apa yang Harus Dilakukan Kemudian?

Tanggung jawab perempuan, baik ibu dan anak perempuan di Kampung Marunda Kepu lebih besar dari tanggung jawab para ayah dan anak laki-laki. Di dalam buku ini diceritakan bahwa peran ibu dalam keluarga yang tidak memiliki anak perempuan atau anak perempuannya masih kecil memiliki tanggung jawab dan pekerjaan yang lebih besar. Mereka harus mengerjakan belasan macam pekerjaan dalam satu hari. Bekerja sepanjang hari harus dilakukan oleh para perempuan di Kampung Marunda Kepu, mulai dari pagi membuka mata hingga saat menjelang tidur. Sementara sebagian besar para bapak bangun jam tiga pagi mencari ikan, pulang jam tujuh pagi agar ikan dapat segera dipasarkan. Para ibu memasak sarapan, berdagang, menjual ikan, menyiapkan makan siang dan mengupas kerang hingga jam sembilan malam. Praktis sepanjang hari selama kurang lebih 17 jam para ibu melakukan pekerjaan ganda, sebagai pengasuh anak dan pencari nafkah. Para anak perempuan mencuci piring, pakaian dan memasak sepulang sekolah. Sementara yang tidak sekolah, sejak siang berkumpul bersama para ibu mengupas kerang. Beban ganda yang dirasakan perempuan di Kampung Marunda Kepu harus ditambah lagi dengan penderitaan yang didapat pascareklamasi di wilayah mereka. Anak-anak mereka tetap tidak bisa bersekolah formal dengan layak bahkan memilih menikah pada usia dini, harga bahan pokok meningkat sehingga mereka tidak bisa terlepas dari rantai kemiskinan, kesehatan dan sanitasi memburuk, ditambah mereka tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan proses jual rugi tanah mereka. Buku ini membuka mata kita bahwa ada persoalan lain di luar kerusakan alam dan lingkungan dari sebuah proyek reklamasi.

Kemiskinan di keluarga nelayan membuat kaum perempuan harus mencari pendapatan tambahan, mengingat pendapatan suaminya tidak bisa diharapkan. Ketidakpastian pendapatan di laut mengharuskan kaum perempuan untuk memikul tanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari (bila musim paceklik), kebutuhan anak sekolah dan kebutuhan "relasi sosial" kampung semisal hajatan, iuran 17 Agustus, iuran acara kampung lainnya. Kemiskinan telah menjadikan perempuan berperan ganda, yakni sebagai pencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga dan anak. Tak jarang perempuan juga harus memikirkan kebutuhan rokok dan kopi

para suami. Dalam kehidupan ekonomi nelayan yang terpuruk, laki-laki menempatkan perempuan nelayan sebagai "manajer" penjualan hasil tangkapan ikan para suami, yang dalam banyak kesempatan juga turut berkorban mencari alternatif pendanaan bila keluarga mengalami kesulitan keuangan, bahkan tidak jarang harus berurusan dengan rentenir ataupun berbagai skema pinjaman lainnya. Namun dalam pengambilan keputusan penting mengenai ganti-rugi harga barang, sero, dan alat tangkap lain yang disebabkan oleh kegiatan reklamasi, para suami tidak pernah mengajak istrinya untuk bernegosiasi dengan para pengusaha. Pun dalam rapat-rapat RT, kaum perempuan tidak diundang, keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan RT/RW juga tidak ada. Demikian halnya dengan anak perempuan di Marunda. Keterampilan nelayan masalah "ilmu warisan" yang secara otomatis dimiliki oleh anak lelaki para nelayan. Sementara anak perempuan tidak mempunyai keterampilan otomatis sebagai bekal hidup. Adanya anggapan bahwa "lelaki adalah pemimpin" membuat anak perempuan di Marunda Kepu tidak mendapat akses pendidikan yang memadai. Sehingga para perempuan hanya mempunyai keterampilan yang tidak bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar (Saragih & Ramanta 2009, h. 73-75). Butuh lebih dari sekadar pemberian ganti rugi atas tanah yang digusur oleh pemerintah untuk proyek reklamasi di manapun reklamasi akan dilakukan. Kasus Kampung Marunda Kepu hanya satu contoh kecil saja dari ratusan wilayah Indonesia yang terus mengalami reklamasi karena berbagai alasan. Butuh sebuah kebijakan yang terstruktur dan berperspektif feminis untuk mewujudkan keadilan untuk perempuan dan anak yang mengalami dampak negatif dari proyek reklamasi ini. Sekalipun penelitian yang dilakukan di buku ini terjadi pada tahun 2008, namun dampaknya pasti akan sama di manapun reklamasi akan dilakukan serta penderitaan yang perempuan dan anak rasakan akibat reklamasi ini akan sama beratnya. Buku ini ingin menunjukkan bahwa di balik proyek reklamasi yang selalu kontroversial karena berbagai isu kepentingan politik dan kapitalis hingga isu kerusakan lingkungan, kita tidak boleh luput bahwa berbagai isu perempuan dan anak juga harus diperhatikan dari dampak reklamasi ini karena secara struktural dan kultural, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan mendapatkan ketidakadilan dari proses pengambilan kebijakan publik yang bias gender.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
2. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
3. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
4. Ro'fah Makin, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
5. Antarini Pratiwi Arna (Oxfam in Indonesia)
6. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

